

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kesejahteraan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan memiliki makna hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, dan sebagainya. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman, lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila (UUD No. 13, 1998).

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN, 1992).

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Indikator kesejahteraan terdiri dari tujuh indikator yaitu: (Badan Pusat Statistik, 2007)

1. Kependudukan

Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

2. Kesehatan dan Gizi

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup.

3. Pendidikan

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan, serta angka putus sekolah dan angka mengulang.

4. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

5. Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk

bukan makanan. Perkembangan sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan.

6. Perumahan dan Lingkungan

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

7. Sosial dan lain-lain

Globalisasi telah mendorong perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang berimbas pada munculnya fenomena- fenomena social. Salah satu fenomena yang semakin berkembang hingga saat ini yaitu bergesernya konsumsi masyarakat dari *non leisure* ke *leisure*. Masyarakat menjadikan wisata sebagai bagian dari kebutuhan yang tercermin dari meningkatnya persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata.

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan fenomena sosial yang kini terjadi yaitu persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan. Kejahatan yang dimaksud berupa pencurian, penganiayaan, mengalami tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya.

2.1.2 Usahatani

Ken Suratiyah (2015) menyebutkan bahwa ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi

seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin. Klasifikasi usahatani dapat dibedakan menurut corak dan sifat, organisasi, pola, serta tipe usahatani. Klasifikasi usahatani terjadi karena adanya perbedaan faktor fisik, ekonomis dan faktor lainnya. Pengklasifikasian yang dimaksud sebagai berikut: (Ken Suratiyah, 2015)

1. Corak dan Sifat

Berdasarkan corak dan sifat, usahatani dibagi menjadi dua, yaitu komersial dan subsisten. Usahatani komersial memperhatikan kualitas serta kuantitas produk sedangkan usahatani subsisten hanya memenuhi kebutuhan sendiri.

2. Organisasi

Berdasarkan organisasi, usahatani dibagi menjadi tiga yaitu usaha individual dimana seluruh proses usahatani dikerjakan oleh petani sendiri beserta keluarganya mulai dari perencanaan, mengolah tanah, hingga pemasaran ditentukan sendiri, kemudian usaha kolektif dimana seluruh proses produksi usahatani dikerjakan bersama oleh suatu kelompok kemudian hasilnya dibagi dalam bentuk uang berupa keuntungan maupun barang atau kenikmatan bukan dalam bentuk uang, kemudian yang terakhir adalah usaha kooperatif dimana tiap proses usahatani dikerjakan secara individual, hanya pada beberapa kegiatan yang dianggap penting dikerjakan oleh kelompok, misalnya membeli saprodi, pemberantasan hama, pemasaran hasil dan pembuatan saluran.

3. Pola

Berdasarkan pola, usahatani dibagi menjadi tiga yaitu usahatani khusus dimana kegiatan usaha tani hanya mengusahakan satu cabang usahatani saja sebagai contoh usahatani tanaman pangan, kedua merupakan pola usahatani tidak khusus dimana kegiatan usahatani mengusahakan beberapa cabang usaha bersama-sama, tetapi dengan batas yang tegas. Dan terakhir usahatani campuran dimana kegiatan usahatani mengusahakan beberapa cabang bersama-sama dalam sebidang lahan tanpa batas yang tegas, contohnya tumpang sari dan mina padi.

4. Tipe

Berdasarkan tipe, usahatani dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan komoditas yang diusahakan, misalnya usahatani ayam, usahatani kambing, dan usahatani jagung. Setiap jenis ternak dan tanaman dapat merupakan tipe usahatani.

Faktor-faktor produksi (input) pertanian yang berperan penting dalam kegiatan usahatani dapat dibedakan menjadi tanah, modal, tenaga kerja dan manajemen (*skill*) sebagai berikut: (Murdiantoro, 2011).

1. Tanah

Tanah merupakan faktor produksi yang penting karena tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman, ternak dan usahatani keseluruhannya. Faktor tanah tidak terlepas dari pengaruh alam sekitarnya seperti sinar matahari, curah hujan, angin, dan sebagainya. Tanah mempunyai sifat istimewa antara lain bukan merupakan barang produksi, tidak dapat diperbanyak, dan tidak dapat dipindah-pindah. Oleh karena itu, tanah dalam usahatani mempunyai nilai terbesar.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usahatani sebagai salah satu unsur penentu, terutama bagi usahatani yang sangat bergantung pada musim. Tenaga kerja juga salah satu faktor penting dalam usahatani keluarga (*family farms*), khususnya tenaga kerja petani beserta anggota keluarganya. Rumah tangga tani yang umumnya sangat terbatas kemampuannya sangat ditentukan dari segi modal dan peranan tenaga kerja keluarga. Jika masih dapat diselesaikan oleh tenaga kerja sendiri maka tidak perlu mengupah tenaga luar, yang berarti menghemat biaya.

3. Modal

Modal merupakan syarat mutlak berlangsungnya suatu usaha, demikian pula dengan usahatani. Tanah serta alam sekitarnya dan tenaga kerja adalah faktor produksi asli, sedangkan modal dan peralatan merupakan substitusi faktor produksi tanah dan tenaga kerja. Dengan modal dan peralatan, faktor produksi tanah dan tenaga kerja dapat memberikan manfaat yang jauh lebih baik bagi manusia serta dengan modal dan peralatan maka penggunaan tanah dan tenaga kerja dapat dihemat.

4. Manajemen

Manajemen merupakan faktor produksi tidak langsung (*intangible*) sebagai sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu usahatani. Jumlah produksi dan keberhasilan suatu usahatani tergantung pada siapa pengelolanya. Manajemen sebagai sumber daya sangat dipengaruhi oleh *human capital* pengelola usahatani tersebut yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan suatu usahatani (Suratiyah, 2015).

2.1.3 Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Witrianto (2005) menyebutkan bahwa yang disebut petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai pencaharian utamanya. Secara garis besar terdapat tiga jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik sekaligus juga menggarap lahan, dan buruh tani.

Petani sebagai unsur usaha tani memegang peranan penting dalam pemeliharaan tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, ia berperan sebagai pengelola usaha tani. Petani sebagai pengelola usaha tani berarti ia harus mengambil berbagai keputusan di dalam memanfaatkan lahan yang dimiliki atau disewa dari petani lainnya untuk kesejahteraan hidup keluarganya. Petani yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu (Rodjak, 2006).

2.1.4 Petani Penggarap Lahan

Petani penggarap adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan orang lain. Biasanya modal untuk mengolah lahan pertanian berasal dari petani penggarap itu sendiri atau petani pemilik dengan upah yang diterima oleh petani penggarap adalah bentuk bagi hasil dengan petani pemilik. Jadi antara petani

pemilik. Dan petani penggarap terjadi kesepakatan atau interaksi yang membentuk suatu hubungan sosial.

Petani pemilik adalah petani yang menguasai usaha sebagai miliknya dan mengelola usahanya sendiri serta memiliki kebebasan dalam merencanakan produksi sedangkan petani pengolah adalah petani yang menguasai usahanya karena adanya hubungan dengan pihak lain baik karena adanya sewa ataupun karena bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Bishop & Toussaint (1996).

2.1.5 Hutan Rakyat

Dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia tidak ada yang secara gamblang menyebutkan istilah hutan rakyat. Baik itu dari undang-undang kehutanan terdahulu (UU Nomor 5 tahun 1967) maupun undang-undang kehutanan saat ini (UU Nomor 41 tahun 1999). Istilah yang mengacu pada hutan rakyat dalam undang-undang tahun 1967 adalah hutan milik, sementara pada undang-undang tahun 1999 adalah hutan hak. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan pada Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hutan rakyat adalah lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan rakyat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Bab 1 Pasal 1 juga disebutkan beberapa istilah yang berkenaan dengan hutan rakyat yaitu hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Definisi ini diberikan untuk membedakannya dari hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti agar dapat mencari perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya untuk dapat menemukan gambaran dan informasi dalam kegiatan

penelitian ini. Oleh karena itu dicantumkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan Octavianingsih (2010), dengan judul “Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Petani Hutan Rakyat” (Studi kasus di Kecamatan Nglipar, Semin dan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat, mengetahui pola pengeluaran petani hutan rakyat, mengetahui neraca pendapatan dan pengeluaran petani hutan rakyat, mengetahui kontribusi hutan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga petani hutan rakyat, serta untuk mengetahui motivasi petani hutan rakyat dalam pengelolaan hutan rakyat terutama untuk pengembangan tanaman jati. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif berupa tabel, grafik dan gambar.

Firani (2011) melakukan penelitian terkait Analisis Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan Rakyat yang merupakan studi kasus di Desa Pandasari, kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi teknik pengelolaan yang dilakukan di hutan rakyat serta menganalisis pengaruh hutan rakyat terhadap pendapatan rumah tangga petani. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskripsi, analisis statistik dan perhitungan kontribusi pendapatan rumah tangga untuk menghitung: rata-rata pendapatan dan pengeluaran petani, rata-rata pendapatan dan pengeluaran total rumah tangga petani, serta kontribusi kegiatan. Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah: Sistem pengelolaan hutan rakyat di Desa Padasari masih tergolong sederhana. Alasan pemanenannya pun masih berdasarkan kebutuhan, serta sistem pemasarannya masih melalui tengkulak atau dijual secara perorangan. Kesimpulan dua menyatakan kontribusi kayu hutan rakyat terhadap pendapatan rumah tangga petani pada strata I adalah sebesar 52,29 persen, pada strata II sebesar 43,57 persen, dan pada strata III sebesar 51,82 persen. Berdasarkan kriteria uji-t maka kontribusi hutan rakyat antara strata I, strata II, dan strata III tidak berbeda nyata. Kesimpulan ke tiga menyebutkan bahwa pengeluaran rumah tangga petani bervariasi tergantung dari keperluannya masing-masing. Pengeluaran terbesar berasal dari pengeluaran untuk keperluan makan, yaitu pada

strata I, strata II, dan strata III masing-masing sebesar 69,88 persen; 67,53 persen; dan 70,62 persen. Serta kesimpulan terakhir yang didapat dari penelitian ini menyebutkan bahwa berdasarkan kriteria kemiskinan BPS, dan Bank Dunia, jika usaha hutan rakyat dikembangkan dan dikelola dengan benar, maka akan dapat mengatasi kemiskinan.

Wijaya *et al.* (2015) melakukan penelitian terkait Analisis Finansial dan Pendapatan Hutan Rakyat Pulau (*Alstonia sp.*) di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha hutan rakyat monokultur (KUHR) dan agroforestri tanaman pulau-karet serta menganalisis kontribusi pendapatan hutan rakyat terhadap total pendapatan petani dan mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga petani. Metode pengambilan sampel menggunakan metode survey dan pengambilan contoh menggunakan pengambilan contoh bertahap (*multistage sampling*). Sementara, analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis finansial dengan tiga kriteria kelayakan yaitu NPV, BCR dan IRR serta analisis pendapatan untuk menghitung pendapatan total rumah tangga petani. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan yang pertama bahwa hutan rakyat Pulau layak untuk dikembangkan dengan sistem monokultur maupun dengan sistem agroforestri. Namun, hutan rakyat yang dikelola dengan sistem agroforestry lebih menguntungkan dibandingkan monokultur. Kesimpulan yang ke dua diketahui berdasarkan analisis sensitivitas, kedua sistem perusahaan hutan rakyat lebih sensitif terhadap penurunan pendapatan dibandingkan peningkatan biaya. Peningkatan luas kepemilikan hutan rakyat di kedua desa penelitian rata-rata sebesar 10,3 persen terhadap total pendapatan rumah tangga. Berdasarkan kriteria kemiskinan Sayogyo sebagian besar petani di lokasi penelitian dalam kategori taraf hidup berkecukupan.

Pambudi (2013), melakukan penelitian terkait Analisis Finansial dan Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi hutan dan untuk mengetahui pola pengelolaan hutan rakyat yang diterapkan oleh petani di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Serta untuk

mengetahui motivasi yang melatarbelakangi petani hutan rakyat dalam pengelolaan hutan rakyat terutama untuk pengembangan tanaman sengon (*Paraserianthes falcataria*). Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif berupa tabel, grafik, dan gambar. Sedangkan analisa kuantitatif sederhana dilakukan untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran petani hutan rakyat. Hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan penelitian ini diketahui bahwa kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan responden pada kelas 1 sebesar 22,9 persen, pada kelas 2 sebesar 29,1 persen, pada kelas 3 sebesar 61,5 persen, dan pada kelas 4 hutan rakyat memberikan kontribusi sebesar 79,1 persen. Sedangkan kontribusi dari hasil non hutan rakyat terhadap pendapatan pada kelas 1 sebesar 77,0 persen, pada kelas 2 sebesar 70,8 persen, pada kelas 3 sebesar 38,4 persen dan pada kelas 4 hasil non hutan rakyat berkontribusi sebesar 20,8 persen. Berdasarkan konsep garis kemiskinan Sajogyo dapat disimpulkan bahwa 63,3 persen berada di atas garis kemiskinan, sehingga dapat dinyatakan bahwa dari 30 responden sebagian besar termasuk kategori sejahtera.

Tanjung (2014), melakukan penelitian terkait Kontribusi Hutan Rakyat terhadap Pendapatan Usahatani di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pengusaha hutan rakyat, mengetahui pola dan teknik pengelolaan hutan rakyat, serta untuk mengetahui kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan total usahatani di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, serta analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran praktek perusahaan hutan rakyat. Untuk analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan bersih yang diterima petani dari hutan rakyat serta sumber-sumber pendapatan yang diperoleh oleh petani hutan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pengamatan, kelompok tani di Desa Bayasari belum memberikan pengaruh yang besar terhadap pengelolaan hutan rakyat karena masih banyak petani yang mengabaikan program kelompok tani.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi hasil hutan rakyat merupakan yang terbesar dibandingkan hasil usahatani lainnya yaitu 33,4 persen

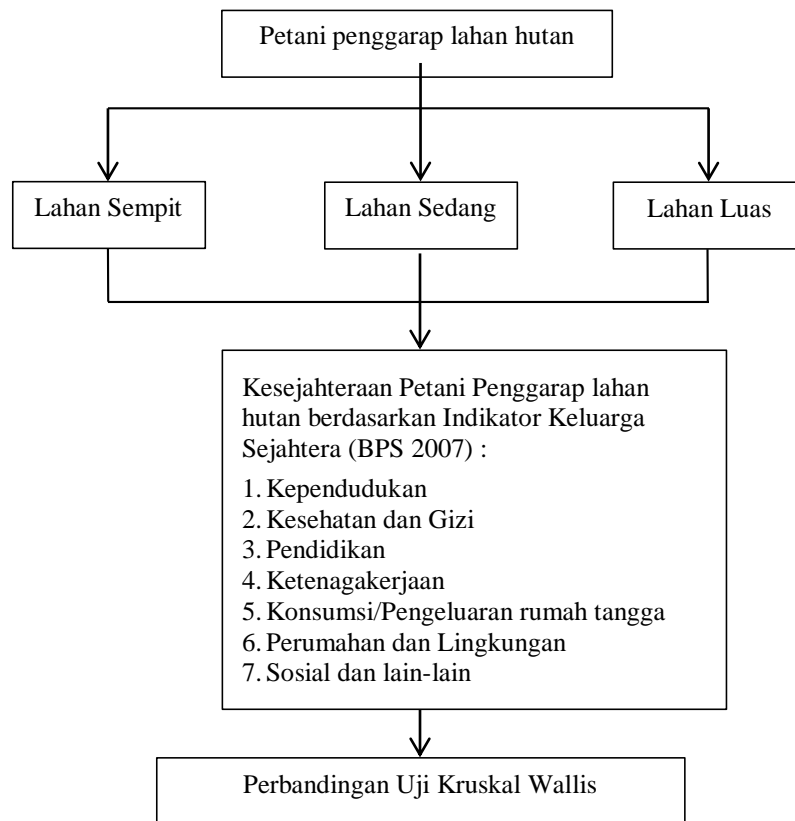
2.3 Kerangka Pemikiran

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0,25 ha, dengan penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan ($> 50\%$), dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 batang (SK Menteri Kehutanan Nomor 49/KPTS-II/1997 dalam mahendra 2009). Munculnya hutan rakyat ini diinisiasi karena adanya lahan-lahan kritis atau tidak produktif sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Penelitian Sari *et al.*, (2014) menggunakan indikator kriteria kesejahteraan menurut Sajogyo dan tujuh kriteria kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) yang disesuaikan berdasarkan kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, atau pengeluaran rumah tangga, perumahan, dan lingkungan, sosial dan lainnya. Penelitian yang dilakukan Setiawan *et al.*, (2018), uji yang digunakan adalah uji *ranking kruskal wallis*. Untuk mengetahui perbandingan produksi padi dan perbandingan pendapatan petani padi sawah pada tiga tipologi sawah lebak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah tujuh indikator menurut BPS tahun 2007 yang kemudian akan dianalisis secara deskriptif. Kemudian juga akan dilihat perbedaan tingkat kesejahteraan antara petani lahan luas, sedang, dan sempit menggunakan Uji Kruskall Wallis.

Pembagian kelompok lahan dalam penelitian ini berdasarkan data aktual di lapangan. Petani skala kecil dengan luas lahan usahatani 0,20 - 0,80 Ha, skala sedang dengan luas lahan usahatani 0,9 - 1,4 Ha, dan skala luas dengan luas lahan usahatani 1,5 - 2 Ha. Berdasarkan uraian di atas, maka skema kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian penulis sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disusun dan susunan skema kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan tujuan kedua adalah:

Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan petani hutan rakyat berdasarkan kelompok penguasaan lahan.